

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bima, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyampaikan laporan tersebut yang menggambarkan kinerja Inspektorat melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun yang menjadi dasar hukumnya sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima:

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima adalah:

1. Tugas

Inspektorat Kota Bima mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang meliputi pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah.

2. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok tersebut diatas, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah
- d. Pemeriksaan, pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun Struktur organisasi Inspektorat Kota Bima per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

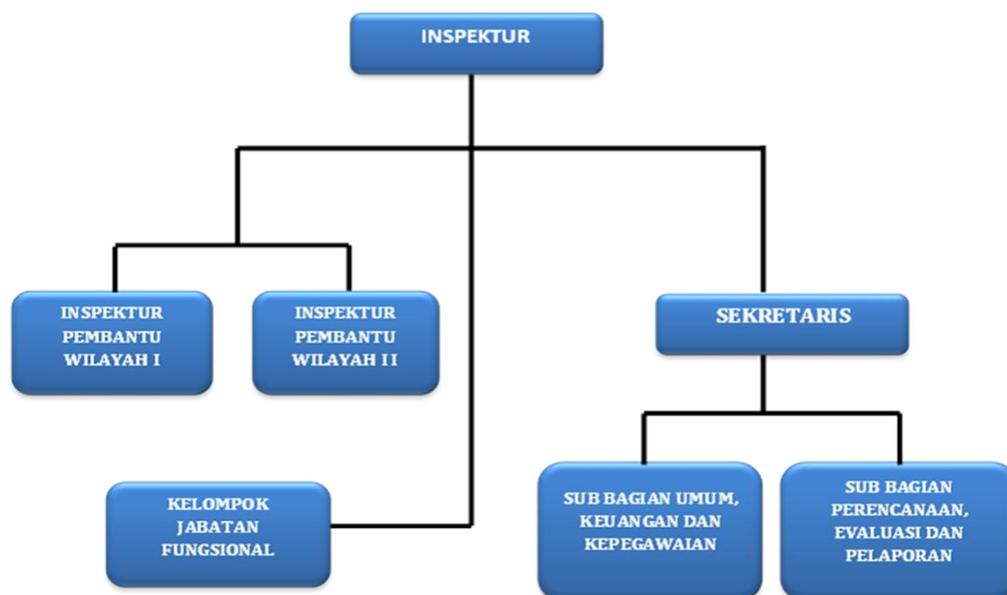
1. Inspektur
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum,Keuangan dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Inspektorat Kota Bima mulai melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan angka kreditnya serta Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BAKN Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional P2UPD dan angka kreditnya maka ada 2 kelompok jabatan fungsional di Inspektorat

- a. Jabatan Fungsional Auditor
- b. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bima Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2016



3. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia di Inspektorat Kota Bima per Desember 2018 berjumlah 54 personil, dengan komposisi sebagai berikut :

1. Menurut Jabatan/Eselon

- Inspektur /Iib : 1 orang
- Sekretaris/IIIa : 1 orang
- Inspektur Pembantu/IIIa : 2 orang
- Kepala Sub Bagian/IVa : 2 orang
- Pejabat Fungsional : 33 orang
- Staf : 15 orang

2. Menurut Tingkat Pendidikan :

- S 3 : 1 orang
- S 2 : 6 orang
- S 1 : 38 orang
- D 3/Sarjana Muda : 0 orang
- SLTA : 6 orang
- SMP : 0 orang

3. Menurut Golongan/Ruang

- Golongan IV/c : 1 orang
- Golongan IV/b : 3 orang
- Golongan IV/a : 1 orang
- Golongan III/d : 10 orang
- Golongan III/c : 16 orang
- Golongan III/b : 16 orang
- Golongan III/a : 2 orang
- Golongan II/d : 0 orang
- Golongan II/c : 0 orang
- Golongan II/b : 0 orang
- Golongan II/a : 5 orang

Berdasarkan tingkat pendidikan, SDM di Inspektorat Kota Bima Belum cukup menunjang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat. Adapun komposisi pegawai berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan, tergambar sebagai berikut :

Tabel I.3.1
Keadaan SDM Inspektorat Kota Bima
Per Desember 2018

No	Eselon	Gol/Ruang (orang)					Tingkat Pendidikan						
		IV	III	II	I	Non Gol.	SD	SMP	SMA	D3/SM	S1	S2	S3
1.	II	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	III	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
3.	IV	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
4.	Fungsional	0	33	-	-	-	-	-	-	-	30	3	-
5.	Staf		9	6	-	-	-	0	6	-	7	2	-
JUMLAH		5	43	6	-	-	0	0	6	-	41	6	1

4. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Inspektorat Kota Bima memerlukan prasarana pendukung. Sampai saat ini Inspektorat Kota Bima belum memiliki gedung kantor sendiri dan menempati eks Kantor Walikota Bima di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2 Kota Bima. Sedangkan

Sarana digunakan untuk pendukung kegiatan operasional Inspektorat. Adapun sarana dan prasara yang dimiliki Inspektorat Kota Bima antara lain:

- a. Mebeleur, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
- b. Fasilitas komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan internet dan mesin faksimili;
- c. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis pengawasan, dilengkapi dengan ketersediaan printer,
- d. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital dan LCD proyektor;
- e. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti lemaries, air conditioner (AC), dispenser, kipas angin dan televisi;
- f. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

5. PENGANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2018 Inspektorat Kota Bima didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018 sebesar Rp.6.785.367.272,31,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah, Tiga Puluh Satu), dan terjadi peningkatan anggaran pada APBD perubahan sebesar Rp. 68.991.694,97 atau total APBDP sebesar Rp. 6.854.358.967,28 (Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah, Dua Puluh Delapan) dengan realisasi sebesar Rp.6.644.957.464 (Enam Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah), atau 96,94%. (Sembilan Puluh Enam Koma Sembilan Puluh Empat Porsen).

Berikut disajikan data realisasi anggaran pada Inspektorat Kota Bima tahun 2013-2018.

Tabel I.5.1 : Realisasi anggaran Inspektorat Kota Bima

No	URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Belanja Pegawai	Rp 369.716.800,00	Rp 279.548.000,00	Rp 180.815.000,00	Rp 939.885.000,00	Rp 910.250.000,00	Rp 357.416.800,00	Rp 241.564.800,00	Rp 178.395.000,00	Rp 911.890.000,00	Rp 838.840.000,00	Rp 836.306.640,00	Rp 767.356.640,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.914.355.900,00	Rp 1.805.632.000,00	Rp 1.920.323.262,00	Rp 2.472.856.250,00	Rp 2.765.050.000,00	Rp 1.840.554.584,00	Rp 1.679.607.401,00	Rp 1.915.215.568,00	Rp 2.430.259.091,00	Rp 2.679.738.580,00	Rp 2.382.178.820,00	Rp 2.062.148.174,20
3.	Belanja Modal	Rp 133.955.000,00	Rp 54.820.000,00	Rp 16.480.000,00	Rp 61.570.000,00	Rp 49.700.000,00	Rp 121.524.000,00	Rp 54.132.000,00	Rp 16.480.000,00	Rp 61.570.000,00	Rp 49.700.000,00	Rp 22.909.000,00	Rp 37.265.200,00
	JUMLAH	Rp 2.418.027.700,00	Rp 2.140.000.000,00	Rp 2.117.618.262,00	Rp 3.474.311.250,00	Rp 3.725.000.000,00	Rp 2.319.495.384,00	Rp 1.975.304.201,00	Rp 2.110.090.568,00	Rp 3.403.719.091,00	Rp 3.568.278.580,00	Rp 3.241.394.460,00	Rp 2.866.770.014,20

Berdasarkan data di atas tergambar jelas bahwa realisasi keuangan Inspektorat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan bahwa realisasi belanja mengalami fluktuasi, namun apabila dipotret antara tahun 2017 dan 2018 maka terjadi penurunan anggaran pada pos belanja pegawai, dan terjadi peningkatan pada belanja barang dan jasa serta penurunan pada belanja modal.

C. ASPEK STRATEGIS.

Pengawasan (*controlling*) adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai kebijaksanaan, program dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya menjadi tanggung jawab pimpinan / manajer pada tingkat manapun. Hakekatnya Pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya pemborosan, penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Demikian halnya dengan Organisasi Pemerintah Daerah Kota Bima, untuk dapat mencapai tujuan dan tugas-tugas bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan maka fungsi Pengawasan menjadi sangat penting. Fungsi ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bima.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); menekankan pentingnya pengawasan yang penjabarannya antara lain diatur dalam PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- Inspektorat Kota Bima mempunyai kompetensi pengawasan atas semua *obyek pemeriksaan* yang ada di wilayah Pemerintah Kota

Bima, kecuali yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

- Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah yang lebih tinggi (BPKP, Inspektorat Provinsi) melakukan pengawasan di Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan / atau diminta oleh Inspektorat Kabupaten/Kota berdasarkan sinergi pengawasan.
- Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya memiliki kompetensi dibidang pengawasan represif dan fungsional atas kebijaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali BPK sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki kewenangan atas semua hal yang menyangkut keuangan negara.

Dalam menghadapi era globalisasi dan otonomi daerah kita perlu merencanakan strategi yang komprehensif. Untuk itu Inspektorat menyikapi dengan menghimpun data-data yang berpengaruh terhadap keberadaan lembaga pengawasan pada masa yang akan datang meliputi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*).

Berdasarkan analisis terhadap kondisi yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja Inspektorat Kota Bima dapat disampaikan beberapa aspek seperti terurai dalam matriks berikut:

Tabel I.C.1:

Isu strategis dan Permasalahan utama Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Bima

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi	
			Internal	Eksternal
1	2	3	4	5
Efektifitas dampak pemeriksaan	Masih Belum Efektif, terlihat dari masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan setiap hasil pemeriksaan	Semakin rendahnya jumlah temuan Pemeriksaan	Keterbatasan anggaran yang berpengaruh terhadap lama Waktu Pemeriksaan	Komitmen kepala OPD untuk TL Temuan pemeriksaan Dan masih rendahnya Penerapan SPIP Di intrn OPD
Kualitas Auditor	Sebagian Besar Aparat Pengawas Pemerintah Daerah masih berada dalam level 1 (Initial) dan 2 (Infrastructure)	Kondisi saat ini Seharusnya kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah sudah berada pada level 3 (Integrated)		Terbatasnya penyelenggaraan Bintek-Bintek yang berkaitan dengan pengawasan

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi	
			Internal	Eksternal
1	2	3	4	5
Kuantitas Auditor	Hanya ada 10 orang auditor, dan hanya 9 P2UPD	atau level 4(Managed) atau 5(Optimized) Seharusnya Inspektorat Kota Bima memiliki 40 Orang Auditor dan 30 P2UPD	Keterbatasan Formasi untuk Rekrutmen tenaga Auditor	Pendidikan JFA yang penyelenggaraanya masih sangat terbatas
Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan	Kualitas LHP belum memenuhi standar pemeriksaan dan Masih kurangnya tenaga fungsional Auditor yang telah mengikuti Diklat Sertifikasi JFA	LHP yang sesuai dengan standar Pemeriksaan	Keterbatasan program Peningkatan kapasitas Mandiri (PKM)	Belum pernah dilaksanakannya Bintek Penulisan LHP yang Efektif.

Uraian dalam matriks diatas menunjukkan bahwa tingginya temuan pemeriksaan sangat bergantung pada komitmen pimpinan OPD yang menjadi auditi disamping ketersediaan tenaga yang berkualitas dan profesional mendorong terwujudnya pengawasan yang efektif. Beberapa hal ini yang menjadi fokus Inspektorat Kota Bima dalam mencapai visi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014 – 2018

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Bima telah menyusun rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2014 – 2018 tentunya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Adapun salah satu misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan indikator pemerintah daerah yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima sekaligus sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan organisasi Inspektorat Kota Bima sebagai berikut :

1. Misi ke 3 (tiga) Pemerintah Kota Bima : ***Mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima.***
2. Sasaran strategis Pemerintah Kota Bima : ***Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik***
3. Arah Kebijakan Pemerintah Kota Bima :
 - a. ***Peningkatan kualitas penilaian kinerja dan pelaporan***
 - b. ***Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah***
4. Indikator Kinerja Pemerintah Kota Bima :
 - a. Opini BPK terhadap LKPD
 - b. Indeks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Untuk mendukung tercapainya RPJMD sebagaimana tersebut diatas maka rencana strategik Inspektorat Kota Bima yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2018 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2018.

1. Visi

Dalam Keppres Nomor 7 Tahun 1999 dinyatakan bahwa visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran sebuah organisasi yang diinginkan di masa depan.

Visi juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 – 2018.

Sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan Inspektorat Kota Bima dituntut untuk dapat menetapkan visi sebagai bagian dari rencana strategik organisasi. Visi senantiasa diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi menuju keadaan yang diharapkan.

Visi Inspektorat Kota Bima adalah

“Terciptanya Akuntabilitas, Transparansi, Efisiensi, dan Efektifitas Dalama Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Profesionalisme Aparatur Inspektorat”

2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan maka Inspektorat Kota Bima menyusun misi dengan jelas yang akan diemban/ dilaksanakan dalam menuju tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Ada 4 (empat) misi yang ditetapkan oleh Inspektorat Kota Bima yang menjadi pegangan dalam merumuskan dan mengemban langkah selanjutnya, yaitu :

1. Meningkatkan Integritas dan Dedikasi Aparatur Inspektorat.
2. Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pengawasan.
3. Mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Bima.

Penjabaran misi selanjutnya kedalam bentuk yang lebih operasional telah dituangkan dalam pernyataan perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dengan indikator serta target yang akan dicapai pada tahun 2018 serta program kegiatan dan anggaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai langkah strategis yang selanjutnya diwujudkan dalam rencana kerja untuk mencapai target yang dijanjikan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari dari suatu tujuan dan sasaranstrategis instansi pemerintah.

Pada tahun 2018, Inspektorat Kota Bima telah menetapkan rencana kerja tahunan dengan mengacu kepada sasaran strategis pemerintah daerah yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima yaitu Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik Baik dengan indikator Kinerja : Indeks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Opini BPK terhadap LKPD. Untuk menunjang tercapainya sasaran strategis dan indikator kinerja pemerintah Kota Bima yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima tersebut, maka Inspektorat Kota Bima mendukung dengan beberapa sasaran strategis tentunya ditunjang dengan program dan kegiatan yang relevan. Adapun program dan kegiatan tersebut terdiri dari 4 (Empat) Program Utama dan 13 (Tiga belas) kegiatan utama yang telah ditetapkan satu kegiatan tidak tersedia anggaran yaitu kegiatan pembinaan dan monev SPIP.

Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2018 tentu diperlukan sumber dana sebagai salah satu syarat keberhasilan

suatu rencana. Dana tersebut juga merupakan salah satu unsur input yang harus dipenuhi dan mempunyai tolak ukur tersendiri. Dengan demikian mudah dipahami bahwa dalam menyusun rencana strategik dan rencana kinerja tahunan, tidaklah terlepas dari sistem penganggaran pada organisasi Inspektorat Kota Bima.

Pada prinsipnya Perjanjian Kinerja tahun 2018 ini akan menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Inspektorat Kota Bima selama tahun 2018. Target kinerja menggambarkan nilai kuantitatif dan kualitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja yang melekat pada setiap program dan kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolak ukur keberhasilan organisasi dalam upaya mencapai misi dan visinya. Sedangkan target kinerja dalam tingkat kegiatan digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan.

Adapun ikhtisar sasaran strategis, indikator kinerja dan kuantitas capaian kinerja pemerintah Kota Bima yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima yang hendak dilaksanakan dalam tahun 2018 yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel II.B.1: Ikhtisar sasaran strategis, indikator kinerja dan kuantitas target capaian Pemerintah Kota Bima

NO	SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH KOTA BIMA	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1 Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap LKPD	WTP
		2 Indeks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/LKIP	BB
Jumlah Anggaran Program		Rp. 1.912.051.629	

Selanjutnya dibawah ini akan diungkapkan rincian sasaran strategis indikator kinerja, beserta program dan kegiatan Inspektorat Kota Bima yang menunjang sasaran strategis pemerintah Kota Bima yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bima :
“ Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik”

Sasaran strategis pemerintah Kota Bima sebagaimana tersebut diatas terdiri dari 2 (dua) Indikator kinerja yang ditunjang dengan 5 (lima) sasaran strategis Inspektorat Kota Bima dengan penjelasan masing – masing sebagai berikut :

1. Indikator Sasaran Pemerintah Kota Bima : “ *Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap LKPD*”

Indikator sasaran sebagaimana tersebut diatas dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memenuhi kriteria antara lain :

- a. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia (SAP).
- b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik.
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping ketiga kriteria utama tersebut LKPD yang disajikan harus didukung dengan bukti-bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidak pastian dan kesalahan yang cukup berarti (no material uncertainties), pengelolaan atas Cash flow dikontrol dengan baik, dan pengelolaan atas aset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap. Artinya, laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material.

Untuk mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana tersebut diatas, maka Inspektorat kota Bima menunjang dengan sasaran strategis dan indikator kinerja pendukung sehingga dari indikator pendukung tersebut dapat mengukur indikator kinerja utama pemerintah Kota Bima, adapun sasaran strategis dan indikator kinerja pendukung dimaksud sebagai berikut :

Tabel II.B.2: Ikhtisar sasaran strategis, indikator kinerja dan kuantitas target capaian Inspektorat Kota Bima untuk penunjang indikator kinerja Opini BPK RI

NO	SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif dan efisien	1. Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material	85,37 %
		2. Jumlah APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas	100,00%
2.	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai aturan yang berlaku	1. Persentase OPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP	82,35%
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM		Rp. 1.822.599.129,00	100,00%

Sasaran startegis Inspektorat Kota Bima untuk menunjang Indikator pemerintah Kota Bima terdiri dari 2 (dua) sasaran yang ditunjang dengan 3 (tiga) Indikator kinerja dengan penjelasan masing – masing sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis Inspektorat 1 : “ Meningkatkan kualitas pengawasan yang efektif dan efisien. ”

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya untuk menunjang indikator sasaran stretegis pemerintah Kota Bima yaitu meraih opini WTP maka Inspektorat Kota Bima tentunya harus meningkatkan kualitas pengawasan secara efektif dan efisien. Untuk mengukur pengawasan telah berjalan efektif dan efisien tentunya ditunjang dengan indikator yang relevan yaitu :

Indikator Sasaran a.1.1 : “ Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material ”

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif dan efisien yaitu membandingkan kinerja sebenarnya dengan standar – standar yang telah ditentukan terlebih dahulu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur kemuradanya, serta mengambil tindakan yang diperlukan yang menjamin pemanfaatan penuh sumberdaya yang digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan kinerja organisasi perangkat daerah sudah sesuai dengan standar, tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku maka salah indikator yang perlu diukur adalah terhadap temuan berulang dalam bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian daerah sehingga dapat mempengaruhi akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang merupakan salah satu unsur penunjang untuk meraih opini WTP. Indikator kinerja ini ditunjang dengan 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut

1. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.
 - b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
 - c. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
 - d. Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan.

Indikator Sasaran a.1.2 : “ Jumlah APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas “

Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas pengawasan sehingga dapat berjalan efektif dan efisien tentunya harus ditunjang dengan ketersediaan tenaga APIP yang melakukan pengawasan dengan menitikberatkan pada kuantitas APIP yang mengikuti

peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas tersebut sekaligus merupakan cerminan kualitas APIP yang melaksanakan fungsi pengawasan secara profesional. Adapun program dan kegiatan untuk menunjang indikator sasaran ini terdiri dari 2 (dua) program dan 4 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
2. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawas :
 - a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturngawas.
 - b. pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.
 - c. bimtek pengawasan operasional.

b. Sasaran Strategis Inspektorat 2 :“ Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai aturan yang berlaku.”

Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka memerlukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai pemerintahan terutama pada satuan organisasi perangkat daerah Kota Bima, guna memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat Kota Bima melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Inspektorat Kota Bima berupaya melakukan pengawasan atas penyelenggaraan SPIP yang pada organisasi perangkat daerah Kota Bima dengan menentukan sasaran strategis yaitu Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai aturan yang berlaku guna menunjang Sasaran dan indikator utama pemerintah Kota Bima.

Untuk mengukur terselenggaranya sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kota Bima sesuai aturan yang berlaku tentunya ditunjang dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Sasaran b.2.1 : “ Persentase OPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP “

Sebagai unsur pertama dalam SPIP, lingkungan pengendalian memegang peranan yang sangat penting karena akan menentukan keberlangsungan pelaksanaan keempat unsur lainnya. Efektifitas pengendalian intern dipengaruhi oleh kondisi dalam instansi, sehingga pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Oleh karena itu dalam menerapkan unsur SPIP tersebut, pimpinan organisasi perangkat daerah bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur, dan praktek detail untuk menyesuaikan dengan kegiatan organisasi perangkat daerah dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. Adapun anggaran khusus program dan kegiatan untuk menunjang indikator sasaran ini belum tersedia seperti untuk pembentukan Satgas SPIP, sosialisasi dan bimtek SPIP, evaluasi SPIP sehingga hanya ingklud dalam program kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.

2. Indikator Sasaran Pemerintah Kota Bima : “ Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “

Indikator sasaran sebagaimana tersebut diatas dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bima.

Untuk mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana tersebut diatas, maka Inspektorat kota Bima menunjang dengan sasaran strategis dan indikator kinerja pendukung sehingga dari indikator pendukung tersebut dapat mengukur indikator kinerja utama pemerintah Kota Bima, adapun sasaran strategis dan indikator kinerja pendukung dimaksud sebagai berikut :

Tabel II.B.2: Ikhtisar sasaran strategis, indikator kinerja dan kuantitas target capaian Inspektorat Kota Bima untuk penunjang indikator Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (OPD)	1. Persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B	82,76%
2.	Meningkatnya kepatuhan aparatur pemerintah yg melaporkan LHK	1. Persentase Pegawai yang telah menyampaikan LHKASN dan LHKPN	90,00%
3.	Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)	1. Jumlah OPD yang memiliki/ mendapatkan WBK/WBBM	75,86%
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM		Rp.89.452.500,00	100%

Sasaran startegis Inspektorat Kota Bima untuk menunjang Indikator pemerintah Kota Bima terdiri dari 3 (tiga) sasaran yang ditunjang dengan 3 (tiga) Indikator kinerja dengan penjelasan masing – masing sebagai berikut :

a. Sasaran Inspektorat Kota Bima 3 :“ Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (OPD). “

Sasaran ini diarahkan untuk mendukung penginformasian pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah pertahunnya, sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan transparansi atas penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi pemerintah yang merupakan salah satu pilar meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Untuk mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja pemerintah Kota Bima, maka Inspektorat Kota Bima menentukan sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas dengan indikator kinerja utama dari sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Indikator Sasaran a.3.1 : “ Persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B “

Dengan adanya indikator ini pemerintah Kota Bima dapat mengukur sejauhmana OPD telah pertanggungjawaban kinerjanya pertahun sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan transparansi atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi pemerintah yang merupakan salah satu pilar meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Adapun program dan kegiatan untuk menunjang indikator sasaran ini sebagai berikut:

1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Reviu SAKIP pemerintah Kota Bima
 - b. Evaluasi LKIP OPD

b. Sasaran Inspektorat Kota Bima 4 :“ Meningkatkan kepatuhan aparatur pemerintah yg melaporkan Laporan Harta Kekayaan “

Salah satu upaya membangun integritas pejabat negara dan aparatur sipil negara (ASN) guna menghindari sifat dan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan maka pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu hal penting yang perlu dilakukan sehingga dapat bermanfaat untuk menanankan sifat transparansi dan tanggungjawab,

terhindar dari fitnah bagi pejabat negara dan aparatur sipil negara (ASN) sekaligus sebagai alat kontrol bagi masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Inspektorat terhadap penyampaian laporan harta kekayaan baik oleh pejabat Negara maupun ASN dilingkungan pemerintah Kota Bima, maka salah satu sasaran Strategis yang ditetapkan inspektorat Kota Bima adalah dengan meningkatkan kepatuhan aparatur pemerintah untuk melaporkan harta kekayaannya.

Untuk mengukur sejauhmana kepatuhan aparatur pemerintahan dalam melaporkan harta kekayaannya maka diperlukan indikator untuk mengukur hal tersebut. Adapun indikator sasaran strategis meningkatnya kepatuhan aparatur pemerintah yg melaporkan laporan harta kekayaan sebagai berikut :

Indikator Sasaran b.4.1 : “ Persentase Pegawai yang telah menyampaikan LHKASN dan LHKPN ”

Dengan adanya indikator ini pemerintah Kota Bima khususnya Inspektorat Kota Bima dapat mengukur sejauhmana kepatuhan penyelenggara pemerintahan di Kota Bima mempertanggungjawabkan hasil kekayaan yang dimiliki sehingga tercipta kepercayaan publik kepada penyelenggara pemerintahan di Kota Bima. Adapun program dan kegiatan untuk menunjang indikator sasaran ini sebagai berikut:

1. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan kegiatan sebagai berikut :
Pemantauan LHKASN.

c. Sasaran Inspektorat Kota Bima 5 :“ Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan

Salah satu upaya penerapan peyananan yang bebas dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh satuan kerja perangkat daerah (OPD) maka perlu dibangun nilai - nilai integritas dalam unsur organisasi

pemerintah daerah melalui pelayanan yang transparans dan bertanggungjawab. Oleh karena itu untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan perlu dilakukan kontrol baik eksternal yaitu masyarakat maupun internal oleh seluruh unsur organisasi terutama Inspektorat yang menjalankan salah satu fungsi pengawasan melalui pemantauan terhadap Zona Integritas bagi OPD yang melakukan pelayanan publik dilingkungan pemerintah Kota Bima. Untuk menjalankan fungsi tersebut maka sasaran Strategis yang ditetapkan Inspektorat Kota Bima adalah dengan Pemantauan Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) .

Untuk mengukur sejauhmana Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) maka diperlukan indikator untuk mengukur hal tersebut. Adapun indikator sasaran strategis tersebut sebagai berikut :

Indikator Sasaran c.5.1 : “ Porsentase OPD yang memiliki/ mendapatkan WBK/WBBM “

Dengan adanya indikator ini pemerintah Kota Bima khususnya Inspektorat Kota Bima dapat mengukur sejauhmana Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) oleh OPD yang melaksanakan fungsi pelayanan publik di Kota Bima. Adapun anggaran khusus program dan kegiatan untuk menunjang indikator sasaran ini belum tersedia seperti untuk pembentukan satgas WBK/WBBM, sosialisasi dan bimtek WBK/WBBM, evaluasi WBK/WBBM sehingga hanya ingklud dalam program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka memberikan gambaran tingkat capaian target kinerja dari masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra maupun rencana kerja tahun anggaran 2018 maka diperlukan pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis guna mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Berikut pengukuran kinerja Inspektorat Kota Bima yang digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis pemerintah Kota Bima yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dan revisi RPJMD pada Tahun 2018.

Inspektorat Kota Bima telah menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai selama masa periode lima tahun yaitu *pertama* meningkatkan kepatuhan OPD terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator Pengelolaan keuangan telah memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan (target : Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah **sesuai** dengan SAP dan SPI) dimana pada tahun 2018 target indikator tersebut telah tercapai dengan cerminan telah diraihnya Opini Wajar Tanpa pengecualian dari BPK perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017 yang dinilai sebagai ukuran kinerja pada tahun 2018. *Kedua:* Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja APIP melalui indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah masuk katagori baik dengan target BB. Pada tahun 2018 raihan capaian atas indikator ini hanya mampu meraih nilai B atau belum mencapai target.

Berikut tabel capaian kinerja Tujuan Inspektorat Kota Bima tahun 2018.

Tabel III.1: Capaian Tujuan Organisasi Inspektorat tahun 2018

NO	Tujuan Organisasi	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatkan Kepatuhan OPD terhadap ketentuan dan Peraturan yang berlaku atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	1 Pengelolaan keuangan telah memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan (Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai dengan SAP dan SPI)	Sesuai	Sesuai	Sesuai
II	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja APIP	2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah masuk katagori baik	BB	B	B

Sedangkan untuk pengukuran kinerja sasaran startegis Inspektorat Kota Bima tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018 pada sasaran strategis pemerintah Kota Bima yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima yaitu meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap LKPD.

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap LKPD tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.2 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap LKPD tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BIMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1 Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BIMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
		Keterangan : Pengukuran berdasarkan opini BPK RI atas hasil pemeriksaan LKPD Kota Bima tahun 2017 yang diaudit tahun 2018			

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 7 diatas menunjukkan bahwa Indikator kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap LKPD, pengukurannya didasarkan pada capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2017, hal ini disebabkan oleh keluarnya opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI atas hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah sekitar bulan Mei setelah tahun anggaran atau tahun 2018 sehingga kinerja yang diukur adalah kinerja tahun anggaran sebelumnya dengan realisasi bersifat kualitatif yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama pemerintah Kota Bima tentunya tidak terlepas dari sasaran strategis dan indikator kinerja Inspektorat Kota Bima sebagai salah satu unsur penunjangnya untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Adapun beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja penunjang serta gambaran perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Inspektorat Kota Bima tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III.3 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja, dari sasaran dan indikator kinerja sasaran yang mendukung indikator pemerintah Kota Bima dengan Indikator opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI tahun anggaran 2017 pemeriksaan Tahun 2018.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan yang	1. Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang	85,37%	60,00%	70,28%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
	efektif, efisien dan Ekonomis.	yang berindikasi kerugian bersifat material			
Keterangan :					
Prosentase target dihitung dengan rumus: jumlah OPD yang ditargetkan untuk tahun n dibagi dengan Jumlah OPD seluruhnya di kali dengan 100%					
Prosentase realisasi dihitung dengan Rumus : jumlah OPD yang tidak mendapatkan temuan berulang dibagi dengan target OPD dikali 100%					
Prosentase Capaian dihitung dengan Rumus : realisasi OPD yang tidak mendapatkan temuan berulang dibagi dengan jumlah total OPD dikali dengan 100%					
	2	Porsentase APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas	100%	100 %	100 %
Keterangan :					
Prosentase target dihitung dengan rumus: jumlah ASN yang ditargetkan untuk Peningkatan Kapasitas tahun n dibagi dengan Jumlah ASN seluruhnya di kali dengan 100%					
Prosentase realisasi dihitung dengan Rumus : jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas dibagi dengan target ASN dikali 100%					
Prosentase Capaian dihitung dengan Rumus : realisasi ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas dibagi dibagi dengan jumlah total ASN dikali dengan 100%					
2	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai aturan yang berlaku	1. Persentase OPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP	82,35%	71,43%	86,74%
Keterangan :					
Porsentase target dihitung dengan rumus: jumlah OPD yang ditargetkan untuk tahun n dibagi dengan Jumlah OPD seluruhnya di kali dengan 100%					
Porsentase realisasi dihitung dengan Rumus : jumlah OPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP dibagi dengan target OPD dikali 100%					
Porsentase Capaian dihitung dengan Rumus : realisasi OPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP dibagi dengan jumlah total OPD dikali dengan 100%					

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 8 diatas menunjukkan bahwa :

- a.1.1. Sasaran Strategis Inspektorat meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan ekonomis dengan indikator persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material menunjukkan bahwa dari OPD yang ditargetkan yang tidak mendapatkan temuan berulang sebesar 85,37% atau sebanyak 35 OPD dari total OPD sebanyak 41 OPD. Dari target tersebut maka terealisasi sebanyak 21 OPD yang tidak mendapatkan temuan berulang atau sebesar 60,00% atau dengan capaian sebesar 70,00 % hal tersebut menunjukkan belum tercapainya target yang diinginkan.
- a.1.2. Sasaran Strategis Inspektorat meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Ekonomis dengan indikator Persentase APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas, target sebesar 100 % atau sebanyak 5 orang pertahun dan untuk tahun 2018 diharapkan sebanyak sebanyak 40 orang dari 35 orang dari tahun 2017. Hasil peningkatan kapabilitas berupa pendidikan formal (penjenjangan, inpassing dan pembentukan) menunjukkan realisasi sebesar 100 % atau terealisasi sebanyak 40 orang dari target 40 orang dengan capaian sebesar 100 % dari target yang ditentukan sebesar 100% atau sudah mencapai target.
- a.2.1. Sasaran Strategis Inspektorat Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai aturan yang berlaku dengan indikator persentase SKPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP. target sebesar 82,35% atau sebanyak 14 OPD Sampling dari total sebanyak 17 OPD Sampling. Hasil OPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP menunjukkan realisasi sebesar 71,43% atau terealisasi sebanyak 10 OPD dari target 14 OPD atau dengan capain sebesar

86,76% dari target yang ditentukan sebesar 82,35% atau telah melebihi target.

b. Indikator Kinerja Indeks SAKIP/ Nilai LKIP.

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Indeks SAKIP/ Nilai LKIP tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.4 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Indeks SAKIP/ Nilai LKIP tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BIMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik	2 Indeks SAKIP/ Nilai LKIP	BB	B	B
Keterangan : Pengukuran berdasarkan Nilai SAKIP Kota Bima atas hasil Evaluasi Kementerian PAN-RB RI tahun 2017 yang dievaluasi tahun 2018					

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 9 diatas menunjukkan bahwa Indikator kinerja Indeks SAKIP/ Nilai LKIP, pengukurannya didasarkan pada capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2017 sebagai acuan capaian tahun 2018, begitupun dengan tahun tahun berikutnya.

Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama pemerintah Kota Bima tentunya tidak terlepas dari sasaran strategis dan indikator kinerja Inspektorat Kota Bima sebagai salah satu unsur penunjangnya untuk memperoleh Indeks SAKIP yang lebih baik.

Adapun beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja penunjang serta gambaran perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Inspektorat Kota Bima tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III. 5 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja, dari sasaran dan indikator kinerja sasaran yang mendukung

indikator pemerintah Kota Bima dengan Indikator Indeks SAKIP/
Nilai LKIP Tahun 2018.

NO	SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3			4
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SKPD)	1. Persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B	89,66%	89,66%	100,00%
Keterangan					
Porsentase target dihitung dengan rumus: jumlah OPD yang ditargetkan untuk tahun n dibagi dengan Jumlah OPD seluruhnya di kali dengan 100%					
Porsentase realisasi dihitung dengan Rumus : jumlah OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B dibagi dengan target OPD menerapkan SAKIP dikali 100%					
Porsentase Capaian dihitung dengan Rumus : realisasi OPD yang menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B dibagi dengan jumlah total OPD dikali dengan 100%					
2.	Meningkatnya kepatuhan aparatur pemerintah yang melaporkan LHK	1. Persentase Pegawai yang telah menyampaikan LHKASN dan LHKPN	93,38%	10,52%	11,25%
Keterangan					
Porsentase target dihitung dengan rumus: jumlah Pejabat/ASN wajib LHKPN/LHKASN yang ditargetkan untuk tahun n dibagi dengan Jumlah Pejabat/ASN wajib LHKPN/LHKASN seluruhnya di kali dengan 100%					
Porsentase realisasi dihitung dengan Rumus : Jumlah Pejabat/ASN wajib LHKPN/LHKASN yang sudah menyampaikan LHKPN/LHKASN dibagi dengan target OPD dikali 100%					
Porsentase Capaian dihitung dengan Rumus : realisasi Pejabat/ASN wajib LHKPN/LHKASN yang sudah menyampaikan LHKPN/LHKASN dibagi dengan jumlah total Pejabat/ASN wajib LHKPN/LHKASN dikali dengan 100%					
3.	Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)	1. Jumlah OPD yang memiliki/mendapatkan WBK/WBBM	86,21%	37,93%	44.00%
Keterangan					

NO	SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3			4
		<p>Porsentase target dihitung dengan rumus: jumlah OPD yang ditargetkan untuk tahun n dibagi dengan Jumlah SKPD seluruhnya di kali dengan 100%</p> <p>Porsentase realisasi dihitung dengan Rumus : jumlah OPD yang ditetapkan memiliki/mendapatkan WBK/WBBM dibagi dengan target OPD yang memiliki/mendapatkan WBK/WBBM dikali 100%</p> <p>Porsentase Capaian dihitung dengan Rumus : realisasi OPD yang ditetapkan memiliki/mendapatkan WBK/WBBM dibagi dengan jumlah total OPD dikali dengan 100%</p> <p>Penilaian untuk tahun 2017 belum dilakukan untuk itu hasil yang tampilkan adalah hasil penilaian tahun 2016.penjelasan sebagaimana diurakan dibawah ini</p>			
	JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	1.816.876.040			

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel III.5 diatas menunjukkan bahwa :

- b.1.1. Sasaran Strategis Inspektorat meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (OPD) dengan indikator Persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B, target sebesar 89,66 % atau sebanyak 26 OPD dari Total 29 OPD (OPD yang di evaluasi karena adanya perubahan Struktur Organisasi sehingga yang diukur hanya pada OPD awal) dengan realisasi sebesar 100% atau OPD yang telah menerapkan SAKIP dengan Nilai Minimal B sebanyak 26 OPD atau dengan capaian sebesar 100 % dari target yang telah ditentukan.
- b.2.1. Sasaran Strategis Inspektorat meningkatnya kepatuhan aparatur pemerintah yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan dengan indikator Persentase Pegawai yang telah menyampaikan LHKASN dan LHKPN sebesar 93,38 % atau sebanyak 3.786 Aparatur Sipil Negara dari total ASN Sebanyak 3.800 dengan realisasi sebesar 10,52 % hanya sebanyak 426 ASN (Pejabat eselon II sampai dengan eselon V) atau hanya tercapai sebesar 11,25 %.

b.3.1. Sasaran Strategis Inspektorat Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dengan indikator Jumlah OPD yang memiliki/mendapatkan WBK/WBBM, untuk tahun 2018 ditargetkan sebesar 86,21% belum dilaksanakan penilaian yang disebabkan oleh belum adanya penetapan terhadap OPD yang akan dinilai. Oleh karena itu data yang ditampilkan untuk tahun 2018 adalah data hasil penilaian tahun 2016 dengan target 38 % atau sebanyak 11 OPD dari 29 OPD yang ada dilingkungan pemerintah Kota Bima dengan realisasi data tahun 2016 sebesar 37,93% dengan capaian untuk tahun 2018 base line data 2016 sebesar 44,00%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir pada sasaran strategis pemerintah Kota Bima yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima yaitu Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik beserta dengan indikator Kinerja pendukung Inspektorat Kota Bima, sebagai berikut

a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap LKPD

Perkembangan Opini BPK RI atas pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Bima 5 tahun terakhir dapat dilihat pada matriks berikut:

Tabel III. 6 : Perbandingan Realisasi dan capaian opini BPK

Tahun audit	Indikator Kinerja Opini BPK RI terhadap LKPD	
	Realisasi	Capaian
2011	Disclaimer	Disclaimer
2012	Disclaimer	Disclaimer
2013	WDP	WDP
2014	WTP	WTP
2015	WTP	WTP
2016	WTP	WTP

Tahun audit	Indikator Kinerja Opini BPK RI terhadap LKPD	
	Realisasi	Capaian
2017	WTP	WTP

Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi tren peningkatan status atas opini BPK RI dari tahun ke tahun dimana sampai dengan tahun 2017 status opini WTP.

Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama pemerintah Kota Bima tentunya tidak terlepas dari sasaran strategis dan indikator kinerja Inspektorat Kota Bima sebagai salah satu unsur penunjangnya untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Adapun beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja penunjang serta gambaran perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Inspektorat Kota Bima dapat dijelaskan dibawah ini.

- 1). Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Ekonomis dengan indikator Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material.

Tabel III.7 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material tahun 2014 dan 2018.

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4
2014	9,76%	37 OPD	90,24%
2015	24,29%	39 OPD	95,12%
2016	36,59%	19 OPD	46,34%
2017	60,98%	26 OPD	63,41%
2018	85,37%	21 OPD	70,28%

Sumber data temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material dari tahun 2011, 2012, 2013 sebagai base line data untuk tahun 2014, begitu dengan tahun – tahun berikutnya dengan kriteria atas beberapa materi kerugian

antara lain : temuan : SPPD, Honorarium dan Belanja Modal. Dari tabel III.17 diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertahun telah melebihi target yang ditentukan walaupun terjadi peningkatan temuan berulang mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Peningkatan temuan berulang tersebut terutama terjadi pada tahun 2016 dimana peningkatan terjadi secara signifikan yaitu sebesar 48,78% bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum. Pada tahun 2017 terjadi penurunan kembali bila dibandingkan dengan tahun 2016 terhadap OPD yang tidak mendapatkan temuan berulang yaitu pada tahun 2016 capaian 46,34% dari target 36,59% sedangkan pada tahun 2017 capaian 63,41% dari target sebesar 60,98%.atau penurunan atas OPD yang tidak mendapatkan temuan berulang sebesar 17,07%. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan kembali sebesar 6,86%.Hal ini menunjukkan ada penurunan capaian terhadap OPD yang tidak mendapatkan temuan berulang dari target yang ditentukan.

- 2). Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Ekonomis dengan indikator Porsentase APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas.

Tabel III.8 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator Porsentase APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

40 ORANG TENAGA FUNGSIONAL YANG MENGIKUTI DIKLAT DAN DIANGKAT S/D TAHUN 2018					
TAHUN	TARGET	%	REALISASI	%	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
2013	20				
2014	20	50,00	20	100	50,00
2015	25	62,50	2	88,00	55,00
2016	30	75,00	6	93,33	70,00
2017	35	87,50	5	82,50	94,29
2018	40	100,00	8	100,00	100,00

Dari tabel data sebagaimana tertera diatas dapat dijelaskan bahwa kebutuhan diklat tenaga fungsional sebanyak 40 orang dengan asumsi kebutuhan pertahun 5 orang dari base line data tenaga tahun 2013 sebanyak 20 orang sehingga capaian akhir tahun 2018 sebesar 100%. Adapun kebutuhan diklat yang menjadi target adalah diklat pembentukan, penjenjangan, dan Inpasing. Dari hasil data tersebut diatas menunjukkan adanya peningkatan pertahun.

- 3). Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai aturan yang berlaku dengan indikator Persentase OPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP

Tabel III.9 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator Persentase OPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

OPD SAMPLING PERTAHUN					
TAHUN	TARGET	%	REALISASI	%	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
2017	7	70,00	5	50,00	71,43
2018	14	82,35	10	71,43	86,74

Untuk data perbandingan tahun sebelumnya belum bisa disajikan disebabkan oleh sasaran dan indikator ini baru tertuang dalam refisi renstra tahun 2017 sehingga data yang bisa disajikan hanya tahun 2017 dan 2018 dengan capaian hasil 86,74% atau telah mencapai terget.

- b. Indeks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Perkembangan Indeks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bima 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.10 : Perbandingan realisasi dan capaian Indeks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bima

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	4	6
2014	B	CC	CC
2015	B	B	B
2016	BB	B	B
2017	BB	B	B
2018	BB	B	B

Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi tren peningkatan status atas Indeks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bima 3 tahun terakhir.pada tahun 2016 Pemerintah Kota Bima telah berhasil meraih Indeks B dari target B atau telah mencapai target. Untuk pengukuran tahun 2017 dengan target indeks AKIB BB dengan capaian B sedangkan untuk tahun 2018 belum dapat ditampilkan dan akan ditampilkan pada tahun 2019 Akhir atau tahun 2020.

Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama pemerintah Kota Bima tentunya tidak terlepas dari sasaran strategis dan indiktor kinerja Inspektorat Kota Bima sebagai salah satu unsur penunjangnya untuk Indeks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bima.

Adapun beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja penunjang serta gambaran perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Inspektorat Kota Bima dapat dijelaskan dibawah ini.

- 1). Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (OPD) dengan indikator Persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B.

Tabel III.11 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator Persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B tahun 2014 dan 2017.

29 SKPD SAMPAI TAHUN 2018					
TAHUN	TARGET	%	REALISASI	%	CAPAIAN
1	2		4		6
2014	18	62,07	18	62,07	100

2015	20	68,97	20	68,97	100
2016	22	75,86	22	75,86	100
2017	24	82,76	24	82,76	100
2018	29	98,66	26	98,66	100

Dari uraian perkembangan persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B tahun 2014 dan 2018 menunjukkan bahwa penerapan SAKIP untuk OPD dilingkungan Pemerintah Kota Bima telah mencapai target pertahun. Hal tersebut tercermin dari capaian yang dihasilkan oleh OPD yang ditunjukkan dengan tingkat keberhasilan pemerintah daerah memperoleh hasil Indek SAKIP dengan nilai baik untuk tahun 2018 penilaian tahun 2019.

- 2). Meningkatnya kepatuhan aparatur pemerintah yg melaporkan LHK dengan indikator Persentase Pegawai yang telah menyampaikan LHKASN dan LHKPN.

Tabel III.12 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator Persentase Pegawai yang telah menyampaikan LHKASN dan LHKPN tahun 2016 dan 2017.

TAHUN	TARGET	%	REALISASI	%	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
2016	3.250	82	225	7	6
2017	3.586	90	824	23	21
2018	3.786	93,48	426	10,52	11,25

Dari perkembangan ASN yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan belum adanya kepatuhan ASN, hal tersebut ditujukan dengan masih redahnya ASN menyampaikan LHKASN dan LHKPN dari sebesar 93,48 % atau sebanyak 3.786 Aparatur Sipil Negara dari total ASN Sebanyak 3.800 dengan capaian sebesar 11,25 % atau hanya sebanyak 426 ASN yang melaporkan dari target yang ditentukan sebanyak 3.786 ASN atau hanya terealisasi sebesar 10,52 %.

- 3). Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dengan indikator Jumlah OPD yang memiliki/ mendapatkan WBK/WBBM.

Tabel III.13 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator Jumlah OPD yang memiliki/ mendapatkan WBK/WBBM tahun 2016 dan 2017.

OPD SAMPLING PERTAHUN					
TAHUN	TARGET	%	REALISASI	%	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
2016	11	37,93	5	100	37,93

Sasaran Strategis Inspektorat Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dengan indikator Jumlah OPD yang memiliki/mendapatkan WBK/WBBM, untuk tahun 2018 ditargetkan sebesar 86,21% belum dilaksanakan penilaian yang disebabkan oleh belum adanya penetapan terhadap OPD yang akan dinilai. Oleh karena itu data yang ditampilkan untuk tahun 2018 adalah data hasil penilaian tahun 2016 dengan target 38 % atau sebanyak 11 OPD dari 29 OPD yang ada dilingkungan pemerintah Kota Bima dengan realisasi data tahun 2016 sebesar 37,93% dengan capaian untuk tahun 2018 base line data 2016 sebesar 44,00%.

3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai tahun 2018 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra.

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2018 dengan target jangka menengah sasaran strategis pemerintah Kota Bima yang menjadi kewenangan Inspektorat Kota Bima yaitu Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan sasaran Strategis Inspektorat Kota Bima untuk menunjang sasaran Strategis serta indikator kinerja pemerintah Kota Bima

dapat digambarkan dengan persentase capaian dari total target dalam rencana strategis. Gambaran capaian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja pemerintah Kota Bima yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Tabel III.14 : Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2018 dengan target jangka menengah Indikator Kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bima	Indikator Kinerja	s/d Tahun 2018			Akhir Renstra 2018
		Target	Realisasi	Capaian	Target
2	3	4	5	6	7
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1 Opini BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP

Dari realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 telah meraih WTP dari target yang ditentukan sampai dengan tahun 2018 yaitu WTP.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama pemerintah Kota Bima tentunya tidak terlepas dari sasaran strategis dan indikator kinerja Inspektorat Kota Bima sebagai salah satu unsur penunjangnya untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Adapun beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja penunjang serta gambaran Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2018 dengan target jangka menengah tahun 2018 dapat lihat pada matrik sebagai berikut.

- 1) Sasaran Strategis Inspektorat 1 : Meningkatkan kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Ekonomis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2018 dengan target jangka menengah Akhir Renstra 2018 dengan indikator Kinerja :

- a) Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material

Tabel III.15 : Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2018 dengan target jangka menengah tahun 2018

Indikator Kinerja Utama Inspektorat	Sampai Dengan Tahun 2018			Tahun 2018
	Target	Realisasi	Capaian	Target
1	2	3	4	5
1. Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material	85,37%	21 OPD (60,00%)	70,28%	85,37%

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 20 diatas menunjukkan bahwa dari jumlah OPD yang ditargetkan sebanyak 35 OPD atau sebesar 85,37% dari total sebanyak 41 OPD yang tidak mendapatkan temuan berulang untuk tahun 2018 maka terealisasi sebanyak 21 OPD atau sebesar 60,00% dengan capaian sebesar 70,28%. hal tersebut menunjukkan belum mencapai target.

- b) Porsentase APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas

Tabel III.16 : Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2018 dengan target jangka menengah tahun 2018

Indikator Kinerja Utama Inspektorat	Sampai Dengan Tahun 2018			Tahun 2018
	Target	Realisasi	Capaian	Target
1	2	3	4	5
2. Porsentase APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas	100%	40 (100%)	100%	100 %

Pada tahun 2017 Porsentase APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas ditarget sebesar 100% atau sebanyak 5 orang pertahun dan untuk tahun 2018 sebanyak 40 orang dari total pegawai yang dibutuhkan untuk jabatan fungsional sebanyak 40 orang sampai dengan tahun 2018, walaupun pada tahun 2018 dari jumlah 40 orang yang mengikuti diklat telah mendapatkan sertifikat dan layak untuk diangkat dalam jabatan fungsional namun belum diangkat dalam jabatan fungsional adapun jumlah yang sudah diangkat sebanyak 33 orang sampai dengan tahun 2018 sedangkan sebanyak 5 orang belum diangkat dengan penyebab masing- masing.

- 2) Sasaran Srategis Inspektorat 2 : Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai aturan yang berlaku.

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah persentase OPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP.

Tabel III.17 : Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2018 dengan target jangka menengah tahun 2018

Indikator Kinerja Utama Inspektorat	Sampai Dengan Tahun 2017			Tahun 2018
	Target	Realisasi	Capaian	Target
1	2	3	4	5
Persentase OPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP	82,35%	10 OPD (71,43)	86,74%	82,35%

Indikator persentase OPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP. target sebesar 82,35% atau sebanyak 14 OPD Sampling dari total sebanyak 29 OPD yang ada. Hasil OPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP

menunjukkan realisasi sebesar 71,43% atau terealisasi sebanyak 10 OPD dari target 14 OPD dengan capaian sebesar 86,74 % dari target yang ditentukan atau lebih dari target. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018 sebesar 82,35%.

- b. Indikator Kinerja pemerintah Kota Bima yaitu Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel III.18 : Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2018 dengan target jangka menengah Indikator Kinerja Indeks SAKIP/LKIP.

Sasaran Strategis pemerintah Kota Bima	Indikator Kinerja	s/d Tahun 2018			Tahun 2018
		Target	Realisasi	Capaian	Target
2	3	4	5	6	7
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik	2 Indeks SAKIP/LKIP	BB	B	B	BB

Untuk tahun 2018 capaian Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah tercapai namun bila dibandingkan dengan target tahun 2018 maka belum mencanpai target.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama pemerintah Kota Bima tentunya tidak terlepas dari sasaran strategis dan indikator kinerja Inspektorat Kota Bima sebagai salah satu unsur penunjangnya untuk mencapai Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah ditargetkan.

Adapun beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja penunjang serta gambaran Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2018 dengan target jangka menengah tahun 2018 dapat lihat pada matrik sebagai berikut.

- 1) Sasaran Strategis Inspektorat 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (OPD)

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah Persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B. Adapun gambaran capaian hasil kinerja sebagaimana tertera dalam matrik berikut ini :

Tabel III.19: Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2017 dengan target jangka menengah Indikator Kinerja Persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B

Indikator Kinerja Utama Inspektorat	Sampai Dengan Tahun 2017			Tahun 2018
	Target	Realisasi	Capaian	Target
1	2	3	4	5
Persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B	98,66%	26 OPD (98,66%)	100,00%	98,66%

indikator Persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B, target sebesar 98,66 % atau sebanyak 26 OPD dari Total 29 OPD (OPD yang di evaluasi karena adanya perubahan Struktur Organisasi sehingga yang diukur hanya pada OPD awal) dengan relisasi sebesar 98,66% atau dengan capaian sebesar 100% dari target yang telah ditentukan. Bila dibandingkan antara realisasi dan capaian tahun 2018 penilaian tahun 2018 dengan target akhir renstra tahun 2018 maka capaian tersebut tercapai.

- 2) Sasaran Strategis Inspektorat 4 : Meningkatnya kepatuhan aparatur pemerintah yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah Persentase Pegawai yang telah menyampaikan LHKASN dan LHKPN.

Adapun gambaran capaian hasil kinerja sebagaimana tertera dalam matrik berikut ini :

Tabel III.20 : Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2017 dengan target jangka menengah Indikator Kinerja Persentase Pegawai yang telah menyampaikan LHKASN dan LHKPN

Indikator Kinerja Utama Inspektorat	Sampai Dengan Tahun 2017			Tahun 2018
	Target	Realisasi	Capaian	Target
1	2	3	4	5
Persentase Pegawai yang telah menyampaikan LHKASN dan LHKPN	93,48%	426 (10,52%)	11,25%	93,48%

Indikator Persentase Pegawai yang telah menyampaikan LHKASN dan LHKPN sebesar 93,48% atau sebanyak 426 Aparatur Sipil Negara dari total ASN Sebanyak 3.800 dengan realisasi sebesar 10,52% dengan capaian sebesar 11,25 %. Bila dibandingkan antara capaian dan target untuk tahun 2018 dengan akhir target reentra masih jauh dari harapan.

- 3) Sasaran Strategis Inspektorat 5 : Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah Jumlah OPD yang memiliki/mendapatkan WBK/WBBM

Adapun gambaran capaian hasil kinerja sebagaimana tertera dalam matrik berikut ini :

Tabel III. 21: Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2017 dengan target jangka menengah Indikator Kinerja Jumlah OPD yang memiliki/mendapatkan WBK/WBBM

Indikator Kinerja Utama Inspektorat	Sampai Dengan Tahun 2018			Tahun 2018
	Target	Realisasi	Capaian	Target

Indikator Kinerja Utama Inspektorat	Sampai Dengan Tahun 2018			Tahun 2018
	Target	Realisasi	Capaian	Target
Jumlah SKPD yang memiliki/mendapatkan WBK/WBBM	86,21 %	37,93 % 2016	44,00 % 2016/2018	86,21 %

indikator Jumlah OPD yang memiliki/mendapatkan WBK/WBBM, untuk tahun 2018 belum dilaksanakan penilaian yang disebabkan oleh belum adanya penetapan terhadap OPD yang akan dinilai. Oleh karena itu data yang ditampilkan untuk tahun 2018 adalah data hasil penilaian tahun 2016 atau sebanyak 11 OPD dari 29 OPD yang ada dilingkungan pemerintah Kota Bima dengan realisasi sebesar 100% atau tercapai 37,93 dengan hasil Zona kepatuhan pada posisi hijau atau nilai sebesar 89,43 dengan asumsi telah mencapai target.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Faktor Keberhasilan adalah faktor yang mempunyai daya ungkit besar untuk mewujudkan visi dan misi. Capaian Kinerja diartikan sebagai hasil yang diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi, capaian dan Target. Sehingga faktor keberhasilan capaian kinerja dapat disimpulkan sebagai faktor yang mempunyai daya ungkit besar untuk meraih target-target yang telah ditetapkan, sehingga realisasi dari program kegiatan lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas Inspektorat Kota Bima dapat memilah capaian kinerja menjadi 2 bagian yaitu indikator yang berhasil dalam capaian kinerja dan indikator yang belum berhasil dalam capaiannya dari sasaran kinerja Pemerintah Kota Bima yaitu meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan sasaran serta indikator kinerja utama Inspektorat Kota Bima untuk menunjang sasaran kinerja serta indikator kinerja utama pemerintah Kota Bima seperti dalam tabel berikut:

- a. Indikator Kinerja pemerintah Kota Bima yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap LKPD.

Tabel III. 22: Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI Terhadap LKPD tahun 2018.

No	Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bima	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	
I	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1 Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI Terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	Berhasil

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 27 diatas menunjukkan bahwa Indikator kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap LKPD tahun anggaran 2017 pemeriksaan tahun 2018 telah berhasil mencapai target.

Berikut ini dapat dijelaskan faktor keberhasilan dari indikator kinerja ini :

Sebagai tolak ukur capaian kinerja tahun 2018 atas Opini BPK RI terhadap LKPD diambil dari hasil opini BPK RI tahun anggaran 2017. Adapun gambaran Opini yang dicapai selama 5 tahun seperti yang tertuang dalam tabel 11. Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Kota Bima belum mampu menerapkan Prinsip akuntansi dalam laporan keuangan secara konsisten sehingga belum bisa keluar dari opini disclaimer. Pada tahun 2012 dan 2013 Pemerintah Kota Bima mulai melakukan perubahan berupa perbaikan terhadap penerapan prinsip akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan opini dari disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian. Upaya perbaikan terhadap penerapan prinsip akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan oleh pemerintah daerah terutama atas pengelolaan aset daerah,

sampai akhirnya pada tahun 2014,2015,2016 dan 2017 pemerintah Kota Bima meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Keberhasilan pencapaian target kinerja pemerintah Kota Bima tentunya tidak terlepas dari dukungan beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja penunjang Inspektorat Kota Bima. Adapun gambaran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja dari Indikator Kinerja Inspektorat Kota Bima tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III. 23 : Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja utama Inspektorat Kota Bima dalam mendukung indikator utama pemerintah Kota Bima yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI Terhadap LKPD.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Inspektorat	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Ekonomis.	1. Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material	85,37%	60,00%	70,28%	Belum Berhasil
		2. Porsentase APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas	100,00%	100,00%	100,00%	Berhasil
2	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai aturan yang berlaku	1. Persentase OPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP	82,35%	71,43%	86,74%	Berhasil

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 28 diatas dapat dijelaskan faktor –faktor keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target dari indikator kinerja sasaran strategis inspektorat Kota Bima sebagai berikut :

- 1) Analisis Keberhasilan dan kegagalan indikator kinerja utama dari sasaran strategis meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan ekonomis.**

a.1.1. *Indikator kinerja persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material.*

Sebagaimana telah dijelaskan dalam tabel perbandingan diatas, baik perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada tahun 2018 maupun perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya dan terget tahun 2018 dapat dijelaskan bahwa Sumber data temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material dari tahun 2011,2012,2013 sebagai base line data untuk tahun 2014,begitu dengan tahun – tahun berikutnya dengan kriteria atas beberapa materi kerugian antara lain : temuan : SPPD, Honorarium dan Belanja Modal. Dari tabel 12 diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertahun telah melebihi target yang ditentukan walaupun terjadi peningkatan temuan berulang mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Peningkatan temuan berulang tersebut terutama terjadi pada tahun 2016 dimana peningkatan terjadi secara signifikan yaitu sebesar 48,78% bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2017 terjadi penurunan kembali bila dibandingkan dengan tahun 2016 terhadap OPD yang tidak mendapatkan temuan berulang yaitu pada tahun 2016 capaian 46,34% dari target 36,59% sedangkan pada tahun 2017 capaian 63,41% dari target sebesar 60,98%.atau penurunan atas OPD yang tidak mendapatkan temuan berulang sebesar 17,07%. Namun pada tahun 2018 terjadi peningkatan kembali. Belum berhasilnya pelampauan dari target tersebut tidak terlepas dari masih kurangnya peran Inspektorat Kota Bima dalam melakukan quality ansurance berupa melakukan fungsi kunsultasi

dengan OPD baik mulai perencanaan sampai dengan peng SPJ an yang disebabkan oleh terbatas/belum tersedianya anggaran khusus atas fungsi asistensi, disamping hal tersebut penyebab lainnya adalah Kurangnya Kooordinasi dan komunikasi antara Auditi dan Auditor, Kurangnya kompetensi pengelola keuangan OPD, Kurangnya kompetensi pemeriksa dalam pengembangan temuan, Kurangnya integritas dan etika aparatur pengelola keuangan, adanya perubahan pola pemeriksaan pada objek pemeriksaan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dan pemanfaatan anggaran, adanya perubahan peraturan – peraturan yang belum diikuti dengan pembuatan dan kepatuhan atas regulasi tersebut.

a.1.2. *Indikator Porsentase APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas.*

Indikator kinerja ini merupakan salah satu indikator kinerja penting kerana merupakan cerminanan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia Inspektorat Kota Bima dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan. Perlu dijelaskan bahwa sebelum tahun 2013 belum terdapat tenaga fungsional auditor dan P2UPD pada Inspektorat Kota Bima, baru pada tahun 2013 dibuka inspassing oleh pemerintah pusat sehingga pada tahun 2013 jumlah auditor sebanyak 20 (dua puluh) orang (base data) diangkat dalam jabatan fungsional. Walaupun tenaga fungsional telah diangkat dalam jabatan fungsional namun belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis fungsional dan penjenjangan secara memadai. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mulai adanya peningkatan kapabilitas melalui optimalisasi kerjasama dalam bentuk peningkatan kapabilitas APIP dengan BPKP selaku

pembina APIP di daerah. sehingga secara kualitas mulai terjadi peningkatan, hal tersebut ditunjukkan dengan mulai meningkatnya tenaga fungsional yang memiliki sertifikat keahlian, penjenjangan. Walaupun secara kuantitas tenaga fungsional masih tertabas dimana sampai dengan tahun 2018 baru sebanyak 33 orang dari target yang diharapkan terpenuhi sampai dengan akhir masa renstra sejumlah 40 orang tenaga fungsional. hal tersebut disebabkan karena adanya mutasi dari jabatan fungsional ke jabatan struktural, meninggal dunia, terbatasnya rekrutmen oleh pemerintah daerah, masih kurangnya minat ASN lain untuk menduduki jabatan fungsional, kurangnya penghargaan dan pengembangan karir yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada tenaga fungsional Inspektorat, lebih lanjut hal lainnya adalah terbatasnya anggaran diklat bagi yang telah menduduki jabatan fungsional terutama tenaga fungsional P2UPD dan tenaga fungsional umum. Namun secara keseluruhan tenaga fungsional telah mengikuti dan memiliki sertifikat untuk diangkat dalam jabatan fungsional telah tercapai sesuai dengan target yang ditentukan yaitu sebesar 100% atau sebanyak 40 orang ditahun 2018.

2) Analisis keberhasilan dan kegagalan indikator kinerja utama dari sasaran strategis Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai aturan yang berlaku.

a.2.1. indikator persentase OPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pimpinan OPD wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya. Salah satu fungsi Inspektorat Kota Bima adalah melakukan koordinasi dan pembinaan terkait dengan penyelenggaraan SPIP dimana didalamnya terdapat lingkungan pengendalian sebagai salah satu unsur SPIP. Pada tahun 2018 Indikator persentase OPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP target sebesar 82,35% atau sebanyak 14 OPD Sampling dari total sebanyak 29 OPD yang ada. Hasil OPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP menunjukkan realisasi sebesar 71,43% atau terealisasi sebanyak 10 OPD dari target 14 OPD dengan capaian sebesar 86,74 % dari target yang ditentukan atau lebih dari target.

Keberhasilan pencapaian target ini lebih disebabkan oleh beberapa faktor baik internal OPD maupun dari Inspektorat sendiri beberapa faktor internal OPD antara lain tersedia petunjuk teknis dan atau Standar operasional prosedur atas program dan kegiatan, semakin membaiknya penerapan dari Standar operasional prosedur atas program dan kegiatan yang telah ada, semakin menguatnya penerapan penegakan integritas dan nilai etika, semakin kuatnya komitmen pada kompetensi terlebih pada tahun 2018 atas penyelenggaraan SPIP sehingga berpengaruh pada tercapainya indikator kinerja ini.

- b. Indikator Kinerja pemerintah Kota Bima yaitu Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel III. 24 : Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

No	Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bima	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	
I	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik	2 Indeks SAKIP/LKIP	BB	B	B	Belum berhasil

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 29 diatas menunjukkan bahwa Indikator kinerja Indeks SAKIP/ Nilai LKIP, pengukurannya didasarkan pada capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2017, hal ini disebabkan oleh hasil evaluasi SAKIP/LKIP tahun 2018 dilakukan pada bulan sembilan tahun 2019 sehingga kinerja yang diukur adalah kinerja tahun anggaran sebelumnya. Dari hasil pengukuran tersebut terlihat bahwa Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah belum mencapai target yang telah ditentukan.

Berikut ini dapat dijelaskan faktor belum berhasilnya dari indikator kinerja ini :

Indikator sasaran ini diarahkan untuk mendukung penginformasian pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah pertahunnya., sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan transparansi atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi pemerintah yang merupakan salah satu pilar terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Gambaran peningkatan capaian Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Nilai Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah selama 3 tahun terakhir seperti yang tertuang dalam tabel 15 diatas tidak terlepas dari mulai penerapan SAKIP belum sepenuhnya menggambarkan efektifitas penggunaan anggaran bila dikaitkan dengan kinerja yang diharapkan terutama terkait dengan definisi kinerja pada perumusan sasaran strategis, kualitas indikator kinerja serta kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja.

Pencapaian target kinerja pemerintah Kota Bima tentunya tidak terlepas dari dukungan beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja penunjang Inspektorat Kota Bima. Adapun gambaran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja dari Indikator Kinerja Inspektorat Kota Bima tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III. 25 : Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja utama Inspektorat Kota Bima dalam mendukung indikator utama pemerintah Kota Bima yaitu Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

No	Sasaran Strategis Inspektorat	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3			4	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (OPD)	Persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B	98,66%	26 OPD (98,66%)	100,00%	Berhasil
2.	Meningkatnya kepatuhan aparatur pemerintah yang melaporkan LHK	Persentase Pegawai yang telah menyampaikan LHKASN dan LHKPN	93,48%	10,52%	11,25%	Belum Berhasil
3.	Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)	Jumlah OPD yang memiliki/mendapatkan WBK/WBBM	86,21 %	37,93 %	44,00 %	Belum Berhasil

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 30 diatas dapat dijelaskan faktor –faktor keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target dari indikator kinerja sasaran strategis inspektorat Kota Bima sebagai berikut :

1) Analisis Keberhasilan dan kegagalan indikator kinerja utama dari sasaran strategis Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SKPD).

b.1.1. Persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B.

Indikator ini berguna untuk dapat mengukur sejauhmana OPD telah pertanggungjawaban kinerjanya pertahun sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan transparansi atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi OPD. Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 penerapan SAKIP oleh OPD telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik hal tersebut tercermin dengan telah tercapainya target yang ditentukan dalam pengukuran persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B dimana pada 2014 capaian untuk indikator ini sebanyak 18 OPD atau 62,07 % dari total OPD dengan realisasi sebesar 100% atau tercapai 62,07 % demikian pula pada tahun 2015, tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 capaian tersebut mampu dipertahankan sebesar target keberhasilan yang ditentukan dengan realisasi 100% OPD atau capaian sebesar 98,66,% dengan target 26 OPD dari total sebanyak 29 OPD dengan rata capaian dengan nilai BB. Keberhasilan capaian kinerja ini tentunya tidak terlepas dari peran seluruh unsur untuk menciptakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dijelaskan atas capaian kinerja pemerintah daerah yang telah memenuhi target yang telah ditentukan diatas hal tersebut antara lain karena membaiknya perencanaan kinerja baik yang dilakukan oleh bappeda, Inspektorat

maupun OPD terkait melalui pola asistensi, koordinasi, dan pembinaan serta reviu atas dokumen perencanaan sehingga dapat menyajikan tujuan, sasaran, indikator dan target - terget yang dapat diukur, baik dalam dokumen RPJMD, Renstra, renja sampai dengan dokumen pelaksanaan anggaran, dengan mulai membaiknya perencanaan tentunya berpengaruh terhadap membaiknya pemenuhan, dan pemanfaatan laporan kinerja yang lebih terarah sehingga program dan kegiatan serta penyerapan yang menunjang sasaran dan indikator kinerja dapat diukur, dengan demikian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya OPD dapat dipertanggungjawabkan.

2) Analisis Keberhasilan dan kegagalan indikator kinerja utama dari sasaran strategis Meningkatnya kepatuhan aparatur pemerintah yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan

b.2.1. Persentase Pegawai yang telah menyampaikan LHKASN dan LHKPN.

Dari perkembangan ASN yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan belum adanya kepatuhan ASN, hal tersebut ditujukan dengan masih redahnya ASN menyampaikan LHKASN dan LHKPN dari target sebesar 93,48% atau sebanyak 3.786 Aparatur Sipil Negara dari total ASN Sebanyak 3.800 dengan realisasi sebesar 10,52% atau hanya tercapai sebesar 11,25% pada tahun 2018 sedangkan tahun 2016 target 82 % realisasi yang melaporkan hanya sebanyak 7% dengan capaian 6 %

Bila dilihat dari data sebagaimana dijelaskan tersebut menunjukkan adanya peningkatan walaupun masih jauh dari harapan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain masih rendahnya

kesadaran ASN untuk menyampaikan harta kekayaan yang dimiliki, belum optimalnya penerapan sanksi bagi ASN yang tidak melaporkan harta kekayaannya, masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Instansi koordinatif, belum optimalnya penerapan sistem base data, revidu dan evaluasi atas laporan harta kekayaan yang ada pada OPD, minimnya pengalokasian anggaran untuk kegiatan penunjang indikator kinerja ini. beberapa hal inilah sebagai contoh faktor penyebab belum tercapainya indikator kinerja ini.

3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan indikator kinerja utama dari sasaran strategis Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

b.3.1. Jumlah OPD yang memiliki/mendapatkan WBK/WBBM.

untuk tahun 2018 belum dilaksanakan penilaian yang disebabkan oleh belum adanya penetapan terhadap OPD yang akan dinilai. Oleh karena itu pada tahun 2018 ini data yang dijadikan ukuran keberhasilan kinerja adalah capaian kinerja hasil penilaian tahun 2016 dengan target 37,93 % atau sebanyak 11 OPD dari 29 OPD yang ada dilingkungan pemerintah Kota Bima dengan realisasi sebesar 100% atau tercapai 37,93 % dengan hasil Zona kepatuhan pada posisi hijau atau nilai sebesar 89,43. Sedangkan untuk target tahun 2018 sendiri adalah sebesar 86,21% yang menerapkan WBK/WBBM dengan realisasi data tahun 2016 sebesar 37,93% dengan capaian untuk tahun 2018 base line data tahun 2016 sebesar 44%. Dari data tersebut diatas indikator kinerja ini belum mencapai target yang diharapkan. Adapun faktor belum berhasilnya pencapaian target ini antara lain belum

membaiknya penerapan manajemen perubahan dalam organisasi pemerintahan khususnya OPD, belum optimalnya penataan tatalaksana organisasi pemerintahan khususnya OPD kordinatif, belum optimalnya penataan sistem manajemen sumber daya manusia pada pemerintah daerah, belum optimalnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan pengawasan serta belum optimalnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang dilakukan oleh OPD yang melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dijelaskan diatas.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Analisis **efisiensi** dilakukan dengan membandingkan antara outcome atau output penting dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Capaian outcome atau output penting yang lebih besar dari realisasi keuangan dan atau capaian input mencapai di atas 100,00% menunjukkan bahwa sasaran startegis yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan **efisien**. Apabila terjadi sebaliknya yaitu capaian outcome atau output penting lebih kecil dari pada realisasi keuangan menunjukkan bahwa sasaran startegis yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan **inefisien**. Sedangkan apabila terjadi capaian outcome atau output penting yang dilaksanakan oleh satuan kerja sama dengan realisasi keuangan menunjukkan bahwa sasaran startegis yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan **sesuai harapan**.

- a. Analisis Efisiensi Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bima yang menjadi kewenangan Inspektorat Kota Bima.

Analisis efisiensi sumber daya dilakukan hanya dengan menggunakan perbandingan dengan nilai Input atau Anggaran yang digunakan. Untuk mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana dimaksud dapat di ketahui dari capaian kinerja sasaran strategis pemerintah Kota Bima dengan

penyerapan anggaran yang digunakan pada tahun 2018 sebagai mana tabel dibawah ini :

Tabel III. 26. Analisis efisiensi

NO	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA REALISASI/CAPAIAN KINERJA SASARAN	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik	85,67%	98,58%	-16,46%

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran strategis pemerintah Kota Bima yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap LKPD bersifat kualitatif, dan indikator kinerja Indeks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bersifat kuantitatif.

Untuk pengukuran indikator kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap LKPD pengukurannya dengan menggunakan konversi pada atribut indikator kinerja pendukung OPD dalam hal ini Inspektorat Kota Bima yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan 2 (dua) indikator kinerja sebagai alat ukur perhitungan rata-ratanya yang disebabkan 1 (satu) indikator kinerja tidak memiliki ketersediaan anggaran khusus. Sedangkan untuk pengukuran Indikator Indeks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pengukurannya dengan menggunakan atribut indikator kinerja Inspektorat Kota Bima yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dan perhitungannya menggunakan 2 (dua) indikator kinerja sebagai alat ukur perhitungan rata-ratanya yang disebabkan 1 (satu) indikator kinerja tidak memiliki ketersediaan anggaran khusus. Adapun gambaran dari sasaran dan indikator kinerja pendukung Inspektorat Kota Bima dapat dilihat pada poin b dibawah ini.

b. Analisis Efisiensi Sasaran Strategis Inspektorat Kota Bima sebagai pendukung sasaran strategis Pemerintah Kota Bima.

Analisis efisiensi sumber daya dilakukan hanya dengan menggunakan perbandingan dengan nilai Input atau Anggaran yang digunakan. Untuk mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana dimaksud dapat di ketahui dari capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kota Bima dengan penyerapan anggaran yang digunakan pada tahun 2018 sebagai mana tabel dibawah ini :

Tabel III.27. Analisis efisiensi

No	Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bima	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Capaian	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	5	6	7	8
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1 Opini Badan Pemeriksa Keuangan	100%	100%	89,91%	11 % efisien

No	Sasaran Strategis Inspektorat Kota Bima	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Capaian	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif dan efisien	1. Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material	60,00%	70,28%	69,30%	-09,30 In Efisien
		2. Porsentase APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas	100,00 %	100,00 %	100,00%	0,00% Efisien

No	Sasaran Strategis Inspektorat Kota Bima	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Capaian	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	5	6	7	8
2.	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai aturan yang berlaku	1 Persentase OPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP	71,43%	86,74%	Tidak tersedia anggaran khusus	Kegiatan tetap berjalan

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BIMA						
Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bima	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Capaian	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	
2	3	5	6	7	8	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik	2 Indeks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	B (63,64%)	B (63,64)	99,43%	35,79%	

No	Sasaran Strategis Inspektorat Kota Bima	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Capaian	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	1 Persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B	89,66%	100,00%	98,39%	08,73% In Efisien
2	Meningkatnya kepatuhan aparatur pemerintah yang melaporkan LHK	1 Persentase Pegawai yang telah menyampaikan LHKASN dan LHKPN	10,52%	11,25%	90,49%	-79,97% In Efisien
3.	Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	1 Jumlah OPD yang memiliki/mendapatkan WBK/WBBM	37,93%	44,00%	Tidak tersedia anggaran khusus	Kegiatan tetap berjalan

No	Sasaran Strategis Inspektorat Kota Bima	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Capaian	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	(WBK/WBBM)					

6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja dianalisa dengan menggunakan analisis **efektivitas** dengan membandingkan antara input dengan output baik untuk rencana maupun realisasi. Capaian outcome yang lebih besar dari pada realisasi keuangan dan atau capaian output mencapai diatas 100,00% menunjukkan bahwa program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan **efektif**. Apabila terjadi sebaliknya yaitu capaian output lebih kecil dari pada realisasi keuangan menunjukkan bahwa program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan **inefektif**. Sedangkan apabila terjadi capaian output sama dengan realisasi keuangan menunjukkan bahwa program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan **sesuai harapan**.

Efektifitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Pengukuran efektifitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator output/*outcome*, *benefit* dan *impact* dari kegiatan yang bersangkutan. Efektifitas kegiatan dibagi atas dua macam, yaitu : (a) efektifitas individual kegiatan; (b) efektifitas terkait dengan pencapaian sasaran.

Adapun gambaran analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja dilihat dari sisi efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel III. 28. Analisis efektifitas atas pelaksanaan program dan kegiatan

No	Uraian Sasaran Strategis Inspektorat	Indikator Utama Inspektorat dan Program dan Kegiatan Pendukung	Indikator Program dan Kegiatan	Efektifitas		
				Input (%)	Output/ Outcome (%)	Ket
1	Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif dan efisien	1. Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material		69,30%	60,00%	In Efektif
		a Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	a. Persentase menurunnya Kasus berulang hasil audit yang bersifat material	98,89%	95,76%	In Efektif
		1) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.	1) Persentase pelaksanaan pemeriksaan operasional secara berkala pada OPD	98,15%	100,00%	efektif
		2) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	2) Persentase kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah yang tertangani	99,74%	100,00%	efektif
		3) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	3) Persentase Pelaksanaan PTL Atas hasil Pemeriksaan Kruneg	99,37%	100,00%	efektif
		4) Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan.	4) Jumlah Dokumen Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan.	53,12%	100,00%	efektif
		2 Porsentase APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas		100,100%	100,00 %	efektif
		a Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa	b Jumlah APIP yang mengikuti diklat Teknis dan bimtek	81,44%	88,89 %	efektif

No	Uraian Sasaran Strategis Inspektorat	Indikator Utama Inspektorat dan Program dan Kegiatan Pendukung	Indikator Program dan Kegiatan	Efektifitas		
				Input (%)	Output/ Outcome (%)	Ket
		dan aparatur pengawasan				
		1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	1) Jumlah Pelatihan diklat dan bimtek pengawasan	78,52%	55,56%	In efektif
		2) Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	2) Jumlah APIP yang bersertifikasi	89,43%	100%	efektif
		3) Bimtek Pengawasan Operasional	3) Jumlah Pelatihan Kantor Mandiri	74,52%	100%	fektif
		b Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	c Jumlah APIP yang mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional	100,00%	100%	efektif
		1) Pendidikan dan pelatihan formal	1) Jumlah APIP yang mengikuti diklat Penjurangan dan pembentukan/In pasing/diklat PIM	100%	100%	efektif
2.	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai aturan yang berlaku	2 Persentase OPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP		Tidak terdapat anggaran khusus	71,43%	efektif
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (OPD)	3 Persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai lebih dari BB		89,66%	98,39%	efektif
		a Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	a. Persentase OPD yang dinilai LKIPnya	89,66%	98,39%	efektif

No	Uraian Sasaran Strategis Inspektorat	Indikator Utama Inspektorat dan Program dan Kegiatan Pendukung	Indikator Program dan Kegiatan	Efektifitas		
				Input (%)	Output/ Outcome (%)	Ket
		1) Reviu SAKIP pemerintah Kota Bima	1) Jumlah Komponen SAKIP yang dilakukan Perbaikan	99,83%	100%	efektif
		2) Evaluasi LKIP OPD	2) Jumlah OPD yang dinilai LKIPnya	98,39%	100%	efektif
4.	Meningkatnya kepatuhan aparatur pemerintah yg melaporkan LHK	4 Persentase Pegawai yang telah menyampaikan LHKASN dan LHKPN		90,49%	10,52%	In efektif
		a Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	a Persentase Pegawai yang telah menyampaikan LHKASN dan LHKPN	90,49%	10,52%	In efektif
		1) Pemantauan LHKASN	1) Jumlah Pemantauan LHKASN dan LHKPN	90,49%	100%	efektif
5	Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)	5 Jumlah OPD yang memiliki/mendapatkan WBK/WBBM		Tidak terdapat anggaran khusus	100%	efektif

Selama tahun 2018, Inspektorat Kota Bima melaksanakan 11 (sebelas) kegiatan dari 4 (empat) program strategis. Berdasarkan hasil pengukuran kinerjanya diperoleh gambaran bahwa sebanyak 8 (delapan) kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, dan 3 (tiga) kegiatan inefektif.

Belum efektifnya pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud lebih disebabkan oleh terbatasnya panggilan diklat oleh lembaga penyelenggara diklat fungsional yaitu BPKP mengingat terbatasnya jumlah peserta diklat pertahunnya sehingga secara langsung berpengaruh terhadap capaian kinerja. Hal lain yang

menyebabkan belum tercapainya indikator ini karena terjadinya pengalihan anggaran untuk pembiayaan diklat fungsional sehingga mengakibatkan belum optimalnya capaian indikator sasaran dan diperparah lagi dengan adanya mutasi dari pejabat fungsional ke struktural pada instansi lain.

Selain program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang belum efektif, terdapat juga program dan kegiatan yang belum efektif berjalan yaitu Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dimana yang menjadi indikator kinerjanya adalah Persentase Pegawai yang telah menyampaikan LHKASN dan LHKPN belum mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain masih rendahnya kesadaran ASN untuk menyampaikan harta kekayaan yang dimiliki, belum optimalnya penerapan sanksi bagi ASN yang tidak melaporkan harta kekayaannya, masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Instansi koordinatif, belum optimalnya penerapan sistem base data, reviu dan evaluasi atas laporan harta kekayaan yang ada pada OPD.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2018 total pagu anggaran Inspektorat Kota Bima untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang dibiayai dengan dana APBD sebesar Rp.6.854.358.967,28,- (Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah, Dua Puluh Delapan), dengan realisasi sebesar Rp.6.644.957.464,00 (Enam Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), atau 96,94% (Sembilan Puluh Enam Koma Sembilan Puluh Empat Porsen).

Sementara anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis yang diharapkan sebagaimana tertuang didalam APBD sebesar Rp.1.767.756.629,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 1.701.166.077,00 atau realisasi sebesar 96,23%.

Berikut ini akan disajikan besaran anggaran, capaian realisasi anggaran pada masing- masing program kegiatan.

Tabel III. 29: Capaian realisasi anggaran program/kegiatan

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Kegiatan	Lebih/ (Kurang)	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	108.394.079,00	108.394.079,00	0,00	100,00%
1	Pendidikan dan pelatihan formal	108.394.079,00	108.394.079,00	0,00	100,00%
2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	42.152.500,00	41.766.000,00	386.500,00	99,08%
1	Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah	21.882.500,00	21.531.000,00	351.500,00	98,39%
2	Reviu LAKIP Kota Bima	20.270.000,00	20.235.000,00	35.000,00	99,83%
3	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.442.185.000,00	1.408.470.000,00	33.715.000,00	97,66%
1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	815.400.000,00	800.291.000,00	15.109.000,00	98,15%
2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	276.235.000,00	275.514.000,00	721.000,00	99,74%
3	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	276.235.000,00	275.514.000,00	721.000,00	99,74%
4	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	27.015.000,00	14.350.000,00	12.665.000,00	53,12%
5	Pemantauan LHKASN	47.300.000,00	42.801.000,00	4.499.000,00	90,49%
4	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	175.025.050,00	142.535.989,00	32.489.052,00	81,44%
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	41.735.000,00	32.770.000,00	8.965.000,00	78,52%
2	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	70.000.000,00	62.600.049,00	7.399.951,00	89,43%
3	Bimtek Pengawasan Operasional	63.290.050,00	47.165.949,00	16.124.101,00	74,52%
J U M L A H		1.767.756.629,00	1.701.166.077,00	66.590.552,00	96,23%

Secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan yang lazim, dan pertanggung jawabannya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Bima tahun 2018 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Inspektorat Kota Bima berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga dimaksudkan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Dalam tahun 2018 sesuai dengan kewenangannya Inspektorat Kota Bima menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran pemerintah Kota Bima dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Sedangkan sasaran strategis Inspektorat Kota Bima sebagai pendukung sasaran dan indikator kinerja Pemerintah Kota Bima telah ditetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja.

Adapun Pencapaian Sasaran Tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Sasaran strategis Inspektorat Kota Bima sebagai sasaran pendukung sasaran pemerintah Kota Bima

Dari 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan terdapat 3 (tiga) sasaran telah mencapai target dengan nilai rata-rata sebesar 61,37%. Dari rata-rata target sebesar 60,58% Sedangkan 2 (dua) sasaran belum mencapai target dengan nilai rata-rata target sebesar 80,10% dengan rata-rata capaian sebesar 35,36% Adapun faktor penyebab dari permasalahan belum tercapainya target adalah :

- a. Masih rendahnya capaian kinerja indikator persentase OPD yang tidak mendapatkan temuan berulang dari sasaran strategis meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan efektif disebabkan oleh
 1. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Auditi dan Auditor
 2. Kurangnya kompetensi pengelola keuangan OPD
 3. Kurangnya kompetensi pemeriksa dalam pengembangan temuan
 4. Kurangnya integritas dan etika aparatur pengelola keuangan
 5. Lemahnya sistem pengendalian intern

6. Kurangnya komitmen pimpinan
 7. Adanya perubahan – perubahan regulasi yang tidak diikuti pembuatan dan kepatuhan atas regulasi tersebut.
- b. Masih rendahnya capaian indikator persentase ASN untuk menyampaikan harta kekayaan yang dimiliki dari sasaran strategis meningkatnya kepatuhan aparatur pemerintah yang melaporkan LHK yang disebabkan oleh
1. belum optimalnya penerapan sanksi bagi ASN yang tidak melaporkan harta kekayaannya.
 2. Masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Instansi koordinatif,
 3. belum optimalnya pelaksanaan reviu dan evaluasi atas laporan harta kekayaan yang ada pada OPD.
- c. Masih rendahnya capaian indikator jumlah OPD yang memiliki/mendapatkan WBK/WBBM yang disebabkan oleh
1. Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh OPD.
 2. Belum optimalnya penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan

B. SARAN

Strategi pemecahan atau langkah-langkah antisipatif untuk perbaikan adalah :

- a. Menurunkan OPD yang mendapatkan temuan berulang dari sasaran strategis meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan dengan langkah –langkah sebagai berikut :
1. meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi antara Auditi dan Auditor melalui asistensi
 2. meningkatkan kompetensi penegelola keuangan OPD melalui diklat maupun workshop
 3. meningkatkan kompetensi pemeriksa dalam pengembangan temuan dengan diklat subtatif/teknis
 4. meningkatkan integritas dan etika aparatur pengelola keuangan dengan pakta integritas
 5. meningkatkan sistem pengendalian intern dengan kontrol kinerja berjenjang
 6. meningkatkan komitmen pimpinan dengan pakta integritas

7. sosialisasi atas perubahan – perubahan regulasi yang diikuti pembuatan standar- standar yang ditetapkan dan dilaksanakan secara konsisten.
- b. Meningkatkan kesadaran ASN untuk menyampaikan harta kekayaan yang dimiliki yang dengan langkah-langkah;
 1. mengoptimalkan penerapan sanksi bagi ASN yang tidak melaporkan harta kekayaannya.
 2. melakukan sosialisasi terkait LHKPN dan LHKASN
 3. mengoptimalkan pelaksanaan reviu dan evaluasi atas laporan harta kekayaan yang ada pada OPD.
 - c. mengoptimalkan OPD pelayanan untuk meraih WBK/WBBM yang dengan langka-langkah sebagai berikut :
 1. mengoptimalkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh OPD.
 2. mengoptimalkan penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan
 3. penguatan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi terutama yang terkait dengan OPD pelayanan publik

Demikian LKIP ini dibuat, guna perbaikan dan peningkatan di tahun mendatang.

Kota Bima, 4 Perbuari 2019

Inspektur

Inspektorat Kota Bima,



Dr. Ir. Syamsuddin.M.S.

Rembina Utama Muda (IV/c)
NIP.1960123 198603 1 0206